UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Perjanjian Sewa Merek dalam Kemitraan Dawet Kemayu
Azalia Zahira Zohar, Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ANALISIS PERJANJIAN SEWA MEREK DALAM KEMITRAAN DAWET KEMAYU

Oleh:
Azalia Zahira Zohar[1] dan Muhammad Jibril[2]

INTISARI

Penelitian ini mengkaji Perjanjian Sewa Merek sebagai perjanjian yang mendasari hubungan dalam kemitraan Dawet Kemayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji konstruksi hukum Perjanjian Sewa Merek antara Dawet Kemayu dengan mitranya menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis implikasi hukum serta implikasi dari penentuan konstruksi Perjanjian Sewa Merek pada kemitraan Dawet Kemayu terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif empiris. Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Sewa Merek Dawet Kemayu diklasifikasikan sebagai perjanjian waralaba karena telah memenuhi unsur *essensialia* perjanjian waralaba, yaitu unsur waralaba yang memenuhi kriteria waralaba yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024, unsur jangka waktu, dan unsur imbalan. Implikasi hukum yang timbul akibat dikualifikasikannya Perjanjian Sewa Merek sebagai perjanjian waralaba meliputi kewajiban prakontraktual dan kewajiban kontraktual yang belum seluruhnya terpenuhi. Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta berpotensi menimbulkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan risiko gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat berujung pada batalnya perjanjian demi hukum.

Kata Kunci: Waralaba, Perjanjian Waralaba, Implikasi Hukum.

[1] Mahasiswa Strata 1 (S-1), Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Departemen Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Perjanjian Sewa Merek dalam Kemitraan Dawet Kemayu
Azalia Zahira Zohar, Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ANALYSIS OF TRADEMARK LEASE AGREEMENT IN DAWET KEMAYU PARTNERSHIP

Authors:
Azalia Zahira Zohar[1] and Muhammad Jibril[2]

ABSTRACT

This study aims to examines the Trademark Lease Agreement as the agreement that underlies the relationship in the Dawet Kemayu partnership. This research aims to find out and examine the legal construction of the Trademark Lease Agreement between Dawet Kemayu and its partners according to Civil Law in Indonesia. This study also analyzes the legal consequences and implications of determining the construction of the Trademark Lease Agreement in the Dawet Kemayu partnership on the rights and obligations of the parties.

This research is descriptive with uses a type of empirical normative. The research materials used in writing this research include primary data obtained through field research, as well as secondary data obtained through official documents, books, and research findings. The data obtained were analyzed using qualitative approach.

The results of the study show that the Dawet Kemayu Trademark Lease Agreement is classified as a franchise agreement because it has fulfilled the essential elements of the franchise agreement, namely the franchise element that meets the franchise criteria as standardized in the Government Regulation Number 35 of 2024, the term element, and the fee element. The legal implications arising from the qualification of the Trademark Lease Agreement as a franchise agreement include pre-contractual obligations and contractual obligations that have not been fully fulfilled. This non-compliance results in the non-fulfillment of the legal cause requirements in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and has the potential to cause administrative sanctions in the form of written reprimands and the risk of lawsuits for Unlawful Acts which can lead to the cancellation of the agreement for the sake of the law.

Keywords: *Franchise, Franchise Agreement, Legal Implication.*

[1] *Undergraduate Student of Civil Law Department in Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.*
[2] *Lecturer of Civil Law Department in Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.*